

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN – II



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rancangan Strategis PD Tahun 2021- 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Hasil capaian kinerja sasaran secara umum ada peningkatan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan target pada triwulan II. Tingkat capaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh berorientasi pada capaian visi dan misi. Capaian pada triwulan II merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja. Masih ada target yang belum tercapai dan akan ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhirnya melalui Laporan Kinerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja khususnya seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun - tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Palangka Raya, 05 Juli 2024

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. **LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes**
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I KINERJA	1
A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansial	1
BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	17
A. Permasalahan	17
B. Tindak Lanjut Penyelesaian.....	18
BAB III PENUTUP	24
LAMPIRAN	

BAB I KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 Triwulan II serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam Pembangunan	
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100,05%
2.	Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	
	- Jumlah ketersediaan Data Tingkat kab/kota	50%
3.	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	104,71%
4.	Meningkatkan pemenuhan Hak dan Perlindungan terhadap anak	
	- Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	100%

5. Meningkatkan kualitas keluarga

- Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	96,90 %
- Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	101,33%

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	112,5%
--	--------

JUMLAH 95,07%

Tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Target Capaian Triwulan II		
					Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,96	81,94	81,98	100,05 %
2	Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data Tingkat kab/kota	Kab/kota	14	6	3	50%

3	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100 %	96 %	104,16 %	104,71 %
4	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	63,68	63,68	63,68	100%
5	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	64,55	64,55	62,55%	96,90%
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TF R per WUS usia 15-49 Tahun	2,25	2,25	2,28	101,33
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	BB	A	112,5%

Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan

urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana, dan Program/kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**PAGU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
30 JUNI TAHUN 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
	01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<u>16.986.495.773</u>	<u>6.117.248.016</u>	36,01	<u>6.773.698.391</u>	<u>39,88</u>
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.187.996.782	5.142.586.342	38,99	5.487.972.611	41,61
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	378.412.500	92.322.272	24,40	113.822.272	30,08
	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.573.877	10.236.600	31,43	10.236.600	31,43
	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.046.968	20.332.910	65,49	20.332.910	65,49
	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.516.476	11.881.800	37,70	13.381.800	42,46
	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283.275.179	49.870.962	17,61	69.870.962	24,67
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.144.034.135	3.502.586.238	43,01	3.507.586.238	43,07
	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.069.876.833	3.464.650.458	42,93	3.464.650.458	42,93
	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	6.623.800	66,24	6.623.800	66,24
	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	64.157.302	31.311.980	48,81	36.311.980	56,60

2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.231.906	-	-	-	-
2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.231.906	-	-	-	-
2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.873.906	7.420.000	10,47	8.820.000	12,44
2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.873.906	7.420.000	10,47	8.820.000	12,44
2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.145.329.323	728.578.486	33,96	865.839.322	40,36
2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.937.132	5.165.800	21,58	5.165.800	21,58
2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	900.574.400	550.606.500	61,14	573.321.709	63,66
2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.008.485	4.960.000	8,55	4.960.000	8,55
2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000	1.590.000	99,38	1.590.000	99,38
2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.133.129	17.384.600	28,91	27.384.600	45,54
2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920.942.077	148.871.586	16,17	217.017.213	23,56
2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	180.134.100	-	-	36.400.000	20,21
2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284.182.506	72.625.159	25,56	136.346.141	47,98
2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	54.855.456	54.160.000	98,73	54.855.456	100,00
2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.327.050	18.465.159	8,05	81.490.685	35,53
2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.702.967.242	432.517.740	25,40	518.698.692	30,46
2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.703.452	6.877.200	50,19	6.877.200	50,19

2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.577.648	86.516.810	27,07	149.982.553	46,93
2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.369.686.142	339.123.730	24,76	361.838.939	26,42
2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.965.264	306.536.447	71,13	336.859.946	78,16
2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.004.900	29.531.130	27,34	52.373.688	48,49
2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.645.953	14.171.847	24,58	19.171.847	33,26
2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	265.314.411	262.833.470	99,06	265.314.411	100,00
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.124.855.574	105.735.050	9,40	148.665.100	13,22
2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	199.043.476	99.595.550	50,04	112.485.550	56,51
2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	74.278.437	41.784.400	56,25	41.784.400	56,25
2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	71.986.600	57.811.150	80,31	70.701.150	98,21
2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	52.778.439	-	-	-	-
2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	888.786.298	-	-	-	-
.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	781.071.310	-	-	-	-

2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	107.714.988	-	-	-	-
2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.025.800	6.139.500	16,58	36.179.550	97,71
2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.025.800	6.139.500	16,58	36.179.550	97,71
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	552.052.238	241.511.394	43,75	347.107.638	62,88
2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	172.690.311	55.795.900	32,31	161.392.144	93,46
2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	50.362.102	13.259.900	26,33	39.392.144	78,22
2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	122.328.209	42.536.000	34,77	122.000.000	99,73
2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	230.059.781	90.176.594	39,20	90.176.594	39,20
2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137.098.679	44.891.763	32,74	44.891.763	32,74

2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	92.961.102	45.284.831	48,71	45.284.831	48,71
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	149.302.146	95.538.900	63,99	95.538.900	63,99
2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	102.317.146	95.538.900	93,38	95.538.900	93,38
2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	46.985.000	-	-	-	-
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	258.520.478	239.236.700	92,54	240.632.500	93,08
2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	73.796.000	71.364.700	96,71	71.364.700	96,71
2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	73.796.000	71.364.700	96,71	71.364.700	96,71
2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	184.724.478	167.872.000	90,88	169.267.800	91,63
2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	184.724.478	167.872.000	90,88	169.267.800	91,63
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	217.530.460	30.192.100	13,88	44.292.100	20,36

2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	217.530.460	30.192.100	13,88	44.292.100	20,36
2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	66.673.010	-	-	1.000.000	1,50
2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	150.857.450	30.192.100	20,01	43.292.100	28,70
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	637.058.913	92.705.642	14,55	114.164.942	17,92
2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	282.855.606	92.705.642	32,77	114.164.942	40,36
2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	74.409.706	12.479.300	16,77	12.478.500	16,77
2.08.06.1.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	208.445.900	80.226.342	38,49	101.686.442	48,78
2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	354.203.307	-	-	-	-
2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	104.203.307	-	-	-	-
2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	250.000.000	-	-	-	-
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.008.481.328	265.280.788	26,30	390.863.500	38,76
2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	514.985.634	99.058.288	19,24	208.771.000	40,54

	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	96.126.741	2.526.600	2,63	47.464.600	49,38
	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	418.858.893	96.531.688	23,05	161.306.400	38,51
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	493.495.694	166.222.500	33,68	182.092.500	36,90
	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	121.578.742	41.381.000	34,04	41.381.000	34,04
	2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	371.916.952	124.841.500	33,57	140.711.500	37,83
2	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<u>998.065.209</u>	<u>172.574.100</u>	<u>17</u>	<u>212.574.100</u>	<u>21,30</u>
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	151.984.773	-	-	-	-
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	151.984.773	-	-	-	-
	2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	151.984.773	-	-	-	-
	2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	-		#DIV/0!	-	#DIV/0!
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	64.222.990	-	-	-	-

2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	27.883.045	-	-	-	-
2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	27.883.045	-	-	-	-
2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.339.945	-	-	-	-
2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	36.339.945	-	-	-	-
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	781.857.446	172.574.100	22,07	212.574.100	27,19
2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	781.857.446	172.574.100	22,07	212.574.100	27,19
2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	781.857.446	172.574.100	22,07	212.574.100	27,19
GRAND TOTAL	17.984.560.982	6.289.822.116	34,97	6.986.272.491	38,85

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Beberapa kendala yang secara umum mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II adalah :

1. Perlunya kolaborasi dan komitmen bersama semua pihak.
2. Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses bagi perempuan dalam pembangunan, memperoleh pendidikan dan pelatihan.
3. Aplikasi SIGA dalam pemeliharaan.
4. Data terpilah dari SOPD belum tersedia.
5. Kurangnya kapasitas SDM pada unit layanan di Kabupaten/Kota yang membutuhkan tenaga profesional yang memiliki sertifikat keahlian terutama yang berkaitan dengan hal mediasi dan konseling;
6. Kurang maksimalnya unit layanan pada kabupaten/kota;
7. Petugas Operator Simfoni PPA Kabupaten/ Kota masih belum sepenuhnya meng input layanan yang diberikan kepada korban ke Simfoni PPA;
8. Kurangnya Anggaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
9. Masih rendahnya peran aktif banyak sektor dalam pemenuhan hak anak yang dituangkan dalam 5 klaster 1 kelembagaan, yang tertuang dalam 24 indikator kabupaten/kota layak anak sebagai upaya pemenuhan hak anak.
10. Belum semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mendapatkan KLA. Di tahun 202 ada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan KLA, 4 (empat) Kabupaten mendapat predikat pramata (Kapuas, Katingan, Kotim, dan Sukamara) dan 2 (dua) kab dan 1 (satu) kota yang mendapat predikat Madya (Palangka Raya, Pulang Pisau, dan Kobar).
11. SDM di Kab/kota yang mengalami mutasi dan kekurangan tenaga SDM yang memahami KLA
12. SDM dari belum memiliki sertifikat KHA

13. Minimnya fasilitasi atas informasi layak anak
14. Kurangnya sosialisasi terkait FAD sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor)
15. Dukungan anggaran yang kecil dari pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaan KLA di Kabupaten/Kota
16. Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak
17. Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan belum optimalnya peran kelembagaan Perlindungan Hak Anak

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana secara Keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan dunia usaha dan inovasi.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah triwulan II tahun 2024 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah perlu upaya – upaya dalam pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Terkait beberapa kendala dan kekurangan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Perlunya kolaborasi dan komitmen bersama semua pihak.
2. Perlunya dukungan, advokasi dan anggaran dalam pencapaian target di Kalimantan Tengah, terutama dalam Peningkatan Perekonomian Perempuan.
3. Kontribusi dalam ekonomi dan segi sumbangan pendapatan perempuan perlu ditingkatkan
4. Menambah jumlah tenaga profesional yang bersertifikat dengan melibatkan tenaga pendamping pada pelatihan dan uji kompetensi.
5. Meningkatkan kapasitas SDM melalui Capacity Building tentang pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
6. Menambah SDM pada layanan UPT yang sesuai standar.
7. Penambahan Anggaran baik dari APBD maupun DAK untuk :
 - Upaya Pencegahan dengan melakukan Perumusan Kebijakan, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Sosialisasi serta Advokasi
 - Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pelayanan serta Penjangkauan Kasus
 - Peningkatan Kapasitas SDM pada Unit Layanan dengan mengadakan atau mengikutsertakan pada Pelatihan Bersertifikasi.
8. Perlunya advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervise untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan KLA termasuk peningkatan, pemahaman tentang hak anak bagi lintas sector terkait (gugus tugas KLA).

Kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinerja.
2. Perlunya dukungan, advokasi dan anggaran dalam pencapaian target di Kalimantan Tengah, terutama dalam Peningkatan Perekonomian Perempuan
3. Kontribusi dalam ekonomi dan segi sumbangan pendapatan perempuan perlu ditingkatkan lagi.

4. Perlunya dukungan dan kerjasama antara SOPD terkait dalam hal penyediaan Data.
5. Menambah jumlah tenaga profesional yang bersertifikat dengan melibatkan tenaga pendamping pada pelatihan dan uji kompetensi;
6. Meningkatkan kapasitas SDM melalui Capacity Building tentang pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
7. Menambah SDM pada layanan UPT yang sesuai standar.
8. Penambahan Anggaran baik dari APBD maupun DAK untuk : Upaya Pencegahan dengan melakukan Perumusan Kebijakan, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Sosialisasi serta Advokasi; penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pelayanan serta Penjangkauan Kasus;
9. Peningkatan Kapasitas SDM pada Unit Layanan dengan mengadakan atau mengikutsertakan pada Pelatihan Bersertifikasi.
10. Pengajuan usulan bantuan berupa Torlin (Motor Perlindungan Perempuan dan Anak dan Molin (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Kementerian PPPA RI kepada UPTD PPA di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum memiliki Torlin dan Molin dalam rangka mendukung pelayanan dan penjangkauan korban kekerasan di daerah.
11. Perlunya dukungan sosialisasi advokasi dan anggaran dalam pencapaian indikator.
12. Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus memerlukan koordinasi.
13. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah.
14. Perlunya advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak termasuk peningkatan, pemahaman tentang Hak Anak dalam lintas sektor terkait Gugus Tugas KLA.
15. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait klaster 1-5 dan Kelembagaan dalam pengumpulan data untuk penilaian Evaluasi KLA.
16. Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan ke Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Penilaian Evaluasi KLA
17. Terlaksananya bimtek KHA bagi SDM disetiap klaster untuk

kabupaten/kota

18. Bertambahnya SRA, RIRA, PRAP, RBRA, PISA dan PKA yang terstandarisasi.
19. Terlaksananya pelatihan 2P (Pelopor dan Pelapor) bagi Forum Anak
20. Terlaksananya pelatihan PATBM di kabupaten/kota sebagai bagian dari kelurahan/desa dalam pencegahan kekerasan terhadap anak
21. Dukungan anggaran yang cukup dari pemerintah daerah kabupaten/kota guna pencapaian KLA
22. Perlu memperkuat UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Propinsi maupun kabupaten dan kota se Kalimantan Tengah, dalam sarana, prasarana dan tenaga yang berkompeten sehingga pelayanan yang dilaksanakan dapat maksimal. Perlu adanya Promosi dan informasi dalam menginformasikan telah adanya tempat Perlindungan perempuan dan anak di Propinsi Kalimantan Tengah, yang juga melakukan pelayanan via Hotline kepada Masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappedalitbang dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, maupun Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk capaian indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih dan tidak dapat diukur dalam jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Dengan adanya visi dan misinya, maka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan semua Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatannya.

Kendati proses pencapaian tujuan dan penetapan ukuran keberhasilan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bersifat kompleks, bukan berarti kinerja Perangkat Daerah ini tidak dapat diukur karena ada fungsi pelayanan yaitu pada Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 05 Juli 2024

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

DOKUMENTASI RAPAT TRIWULAN II

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso No. 11 Telp. 0536 - 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@kalteng.go.id

PALANGKA RAYA 73112

A. Target Realisasi Kinerja Tahunan

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data	Satuan	Target	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{(I_{par} + I_{DM} + I_{lin-dist})}{3}$	DINAS P3APPKB Kab/Kota, Se Kalimantan Tengah dan BPS	Indeks	81,96	81,96	81,96	81,96	81,96
2.	Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data Tingkat kab/kota	kabupaten/ kota	DINAS P3APPKB Kab/Kota Se Kalimantan Tengah	kabupaten/ kota	14	0	6	8	14
3.	Meningkatnya Pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	$PKK = \frac{JKKLK}{JKK} \times 100 \%$	DINAS P3APPKB Kab/Kota Se Kalimantan Tengah	persen	100%	95%	96%	98%	100%
4.	Meningkatkan Pemenuhan hak dan Perlindungan Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Nilai kluster = $\frac{Jl \text{ nilai indikator kluster}}{Jl \text{ indikator}}$ $IPA = \sum \text{nilai kluster} \times \text{bobot}$	DINAS P3APPKBSE- Kalimantan Tengah Badan Pusat Statistik, SAKERNAS, SUSENAS, BAPPENAS	persen	63,68	63,68	63,68	63,68	100
5.	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Formula Ibangga : $Ibangga = \frac{1}{3} (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}) \times 100$	DP3APPKB Kab/Kota Sekalimantan Tengah dan BKKBN Perwakilan Provinsi Kalteng	persen	64,55 %	64,55 %	64,55 %	64,55 %	64,55 %
		Angka Kelahiran Total/Total Vertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \times \sum_{I=15-19}^{45-49} SFR$	DP3APPKB Kab/Kota Sekalimantan Tengah dan BKKBN Perwakilan Provinsi Kalteng	Total Fertility Rate/ TFR per WUS Usia 15-49 Tahun	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	Dinas P3APPKB Se Kalimantan Tengah, Inspektorat, Biro Organisasi, Setda Prov.Kalteng	skor	BB	BB	BB	BB	BB

B. Target Realisasi Kinerja Triwulan II

No.	Sasaran strategis	Indikator KinerjaUtama	Satuan	Target Tahun 2024	Target Triwulan II	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	81,96	81,96	81,98	100,05 %
2.	Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data Tingkat kab/kota	Kab/kota	14 Kab/kota	6	3	50%
3.	Meningkatnya Pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100%	95%	96 %	104,16%
4.	Meningkatkan Pemenuhan hak dan Perlindungan Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	63,68	63,68	63,68	100%
5.	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	persen	64,55 %	64,55 %	62,55%	96,90 %
		Angka Kelahiran Total/Total Vertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/ TFR per WUS Usia 15-49 Tahun	2,25	2,25	2,28	101,33
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	BB	BB	A	112,5%

**PAGU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
	01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16,986,495,773	6,117,248,016	36.01	6,773,698,391	39.88
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13,187,996,782	5,142,586,342	38.99	5,487,972,611	41.61
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	378,412,500	92,322,272	24.40	113,822,272	30.08
	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,573,877	10,236,600	31.43	10,236,600	31.43
	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31,046,968	20,332,910	65.49	20,332,910	65.49
	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31,516,476	11,881,800	37.70	13,381,800	42.46
	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283,275,179	49,870,962	17.61	69,870,962	24.67
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,144,034,135	3,502,586,238	43.01	3,507,586,238	43.07
	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,069,876,833	3,464,650,458	42.93	3,464,650,458	42.93
	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000	6,623,800	66.24	6,623,800	66.24
	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	64,157,302	31,311,980	48.81	36,311,980	56.60
	2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31,231,906	-	-	-	-
	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31,231,906	-	-	-	-
	2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,873,906	7,420,000	10.47	8,820,000	12.44
	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70,873,906	7,420,000	10.47	8,820,000	12.44
	2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,145,329,323	728,578,486	33.96	865,839,322	40.36
	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23,937,132	5,165,800	21.58	5,165,800	21.58
	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	900,574,400	550,606,500	61.14	573,321,709	63.66
	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58,008,485	4,960,000	8.55	4,960,000	8.55
	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,600,000	1,590,000	99.38	1,590,000	99.38
	2.08.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	60,133,129	17,384,600	28.91	27,384,600	45.54
	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920,942,077	148,871,586	16.17	217,017,213	23.56
	2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	180,134,100	-	-	36,400,000	20.21
	2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284,182,506	72,625,159	25.56	136,346,141	47.98
	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	54,855,456	54,160,000	98.73	54,855,456	100.00
	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229,327,050	18,465,159	8.05	81,490,685	35.53
	2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,702,967,242	432,517,740	25.40	518,698,692	30.46
	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,703,452	6,877,200	50.19	6,877,200	50.19
	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319,577,648	86,516,810	27.07	149,982,553	46.93
	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,369,686,142	339,123,730	24.76	361,838,939	26.42

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
	2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430,965,264	306,536,447	71.13	336,859,946	78.16
	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	108,004,900	29,531,130	27.34	52,373,688	48.49
	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57,645,953	14,171,847	24.58	19,171,847	33.26
	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	265,314,411	262,833,470	99.06	265,314,411	100.00
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,124,855,574	105,735,050	9.40	148,665,100	13.22
	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	199,043,476	99,595,550	50.04	112,485,550	56.51
	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	74,278,437	41,784,400	56.25	41,784,400	56.25
	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	71,986,600	57,811,150	80.31	70,701,150	98.21
	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	52,778,439	-	-	-	-
	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakat	888,786,298	-	-	-	-
	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	781,071,310	-	-	-	-
	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	107,714,988	-	-	-	-
	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37,025,800	6,139,500	16.58	36,179,550	97.71
	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	37,025,800	6,139,500	16.58	36,179,550	97.71
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	552,052,238	241,511,394	43.75	347,107,638	62.88
	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi	172,690,311	55,795,900	32.31	161,392,144	93.46
	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	50,362,102	13,259,900	26.33	39,392,144	78.22
	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	122,328,209	42,536,000	34.77	122,000,000	99.73
	2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Layanan Lanjutan	230,059,781	90,176,594	39.20	90,176,594	39.20
	2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah	137,098,679	44,891,763	32.74	44,891,763	32.74
	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	92,961,102	45,284,831	48.71	45,284,831	48.71
	2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	149,302,146	95,538,900	63.99	95,538,900	63.99
	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan	102,317,146	95,538,900	93.38	95,538,900	93.38
	2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	46,985,000	-	-	-	-
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	258,520,478	239,236,700	92.54	240,632,500	93.08
	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Keluarga	73,796,000	71,364,700	96.71	71,364,700	96.71
	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	73,796,000	71,364,700	96.71	71,364,700	96.71
	2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerja	184,724,478	167,872,000	90.88	169,267,800	91.63
	2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	184,724,478	167,872,000	90.88	169,267,800	91.63
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	217,530,460	30,192,100	13.88	44,292,100	20.36
	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	217,530,460	30,192,100	13.88	44,292,100	20.36
	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	66,673,010	-	-	1,000,000	1.50
	2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	150,857,450	30,192,100	20.01	43,292,100	28.70

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	637,058,913	92,705,642	14.55	114,164,942	17.92
	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	282,855,606	92,705,642	32.77	114,164,942	40.36
	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	74,409,706	12,479,300	16.77	12,478,500	16.77
	2.08.06.1.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,	208,445,900	80,226,342	38.49	101,686,442	48.78
	2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	354,203,307	-	-	-	-
	2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	104,203,307	-	-	-	-
	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	250,000,000	-	-	-	-
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1,008,481,328	265,280,788	26.30	390,863,500	38.76
	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi d	514,985,634	99,058,288	19.24	208,771,000	40.54
	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	96,126,741	2,526,600	2.63	47,464,600	49.38
	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak	418,858,893	96,531,688		161,306,400	
	Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi			23.05		38.51
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Ko	493,495,694	166,222,500	33.68	182,092,500	36.90
	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan K	121,578,742	41,381,000	34.04	41,381,000	34.04
	2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	371,916,952	124,841,500	33.57	140,711,500	37.83
2	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	998,065,209	172,574,100	17.29	212,574,100	21.30
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	151,984,773	-	-	-	-
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi	151,984,773	-	-	-	-
	2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingka	151,984,773	-	-	-	-
	2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	-		#DIV/0!	-	#DIV/0!
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	64,222,990	-	-	-	-
	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Inform	27,883,045	-	-	-	-
	2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan E	27,883,045	-	-	-	-
	2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Prov	36,339,945	-	-	-	-
	2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	36,339,945	-	-	-	-
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	781,857,446	172,574,100	22.07	212,574,100	27.19
	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Keta	781,857,446	172,574,100	22.07	212,574,100	27.19
	2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengas	781,857,446	172,574,100	22.07	212,574,100	27.19
	GRAND TOTAL	17,984,560,982	6,289,822,116	34.97	6,986,272,491	38.85

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah



dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006